

**EVALUASI MANFAAT DAN KEBERHASILAN
UNIT PENEMPATAN TRANSMIGRASI SITIUNG
(Studi Kasus dengan Metode "Analytical Hierarchy Process")**

TESIS

Oleh :

ZAIRUL

95206036



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2000**

**EVALUASI MANFAAT DAN KEBERHASILAN
UNIT PENEMPATAN TRANSMIGRASI SITIUNG**
(Studi Kasus dengan Metode " Analytical Hierarchy Process")

Oleh : **ZAIRUL**

(Dibawah bimbingan Syafrizal, Nurzaman Bachtiar
dan Rahmat Syahni)

RINGKASAN

Dengan berkembangnya wilayah administrasi Sitiung dan penambahan jumlah penduduk lebih kurang 3,5 kali dari jumlah semula dan lokasi tempat tinggal yang tersebar menimbulkan banyak kegiatan dan masalah baru yang berkaitan dengan tugas pemerintah Sitiung dalam pembinaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka dilakukanlah penelitian dengan tujuan: 1). Mengevaluasi manfaat dan keberhasilan dari proyek Sitiung I, Sitiung II, Sitiung III dan Sitiung IV. 2). Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan perluasan wilayah administrasi, dan memberikan manfaat dari perluasan wilayah administrasi tersebut terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sitiung I, Sitiung II, Sitiung III, dan Sitiung IV.

Penelitian ini berdasarkan data lapangan dari 3 (tiga) kelompok utama masyarakat yang berperan dalam pembangunan Sitiung yaitu : 1) Kepala desa sebagai pejabat pemerintah. 2) Ketua LKMD/LSM sebagai pemuka/pemimpin masyarakat. 3). Pengusaha sebagai kalangan swasta/investor.

Dengan pengambilan empat orang responden pada masing-masing kelompok didapat 12 responden untuk keseluruhan Sitiung (Sitiung I, II, III, IV). Dari 12 responden ini dihasilkan 60 kombinasi untuk manfaat perluasan/pengembangan wilayah, dan 60 kombinasi keberhasilan perluasan/pengembangan wilayah

Penelitian ini dilakukan 3 (tiga) tahap : Tahap Pertama melihat kondisi dan situasi Sitiung sebelum perluasan dibandingkan dengan setelah perluasan,

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 dijelaskan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Usaha Pembangunan Nasional yang dikaitkan dengan program transmigrasi pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan nasional yang dituangkan dalam TAP-TAP MPR dengan GBHN-nya.

Penyelenggaraan transmigrasi di Sumatera Barat sebenarnya telah dimulai semenjak Tahun 1953 dan berlanjut sampai sekarang. Di Sitiung sendiri penempatan transmigrasi dimulai pada Pelita I (1964/1965 – 1969/1970) yaitu Sitiung I dan Pelita II (Sitiung II), dan sekarang telah berkembang menjadi Sitiung III dan Sitiung IV. Transmigrasi Sitiung ini pada umumnya dari daerah Wonogiri (Jawa Tengah) yang dipindahkan ke daerah Sitiung akibat adanya pembangunan Waduk Gajah Mungkur, sebagai pemasok air untuk pertanian.

Akibat perluasan wilayah Sitiung tersebut, dan penambahan penduduk menjadi lebih kurang 3,50 kali dari jumlah semula dengan lokasi tempat tinggal yang tersebar tidak merata, muncul permasalahan baru yang berkaitan dengan beban tugas dan tanggung jawab serta kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam pembinaan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Sujarto dkk (1981 : 3-4) permasalahan yang timbul adalah :

- a. Perluasan wilayah administrasi baik kota maupun desa, bila ditinjau dari segi pemerintahan berarti bertambah luasnya lingkup pengawasan (*span of control*) dari pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pengendalian pembangunan semakin kecil.
- b. Perluasan wilayah administrasi pada hakekatnya menimbulkan masalah-masalah baru misalnya tata ruang, penggunaan lahan, daerah pemukiman antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kotamadya.
- c. Perluasan wilayah administrasi pada hakekatnya akan mempunyai konsekwensi terhadap kemampuan sarana fasilitas dan utilitas umum. Semakin luas wilayah itu, semakin luas pula jangkauan pelayanan sarana fasilitas yang dibutuhkan, serta semakin luas pula jaringan utilitas umum dan jaringan jalan.
- d. Suatu perluasan wilayah administrasi, juga berarti suatu pembukaan kesempatan untuk mengembangkan daerah terbangun (*built up areas*). Hal ini dalam banyak hal telah menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekologis, biologis dan geologis.

Gangguan terhadap ekologis misalnya pembabatan hutan, sumbar-sumber air, terhadap biologis adalah terhadap makhluk-makhluk hidup misalnya binatang dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan terhadap geologis misalnya pengrusakan alam, vegetasi dan lain-lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), maka dapat diperbandingkan secara empiris berdasarkan pengetahuan, pengalaman, intuisi dan ingatan responden tentang rasio manfaat dan keberhasilan pada kondisi dan situasi sebelum dan setelah perluasan wilayah Sitiung. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi dan situasi Sitiung dengan mempertimbangkan manfaat dan keberhasilan sebelum perluasan ternyata kurang baik dibandingkan dengan setelah perluasan wilayah administrasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rasio 0,7878 untuk wilayah Sitiung sebelum perluasan, dan 1,1084 untuk Sitiung setelah perluasan wilayah.
2. Manfaat perluasan wilayah dapat dinikmati oleh 3 (tiga) kelompok aktor di Sitiung, yaitu Pemerintah setempat, masyarakat, dan pengusaha/kalangan swasta. Porsi manfaat terbesar dirasakan oleh *masyarakat*, sedangkan *pemerintah Sitiung* hanya merasakan sedikit manfaat dari perluasan wilayah tersebut dan pengusaha kalangan *swasta* mendapat porsi ke dua.
3. Disamping mendapat manfaat terbesar, *masyarakat* juga merasakan keberhasilan perluasan wilayah yang terbesar, sedangkan *pemerintah Sitiung* dan *pengusaha/kalangan swasta* relatif tidak merasakan keberhasilan perluasan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, 1986. Ketransmigrasian dan Pengembangan Wilayah. Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- Alianis, Dkk, 1991. Propil Kegiatan Ekonomi Sektor Informal di Sumatera Barat. Laporan Penelitian Dana SPP/DPP IKIP Padang, Lembaga Penelitian Padang
- Ananta, Aris dan Sugiharso, 1998. Dampak Pendidikan, pada Penghasilan Studi Kasus di Jawa Timur, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta.
- Arsyad Anwar, Mohamad, H. Basri, Faisal, Ikhsan, Mohamad, 1995. Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan. Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Penerbit PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi, Penerbit : Media Madya Mandala, Yogyakarta.
- Bappeda Tingkat I Sumatera Barat dengan Kantor Statistik Sumbar, 1994. Sumatera Barat Dalam Angka.
- BAPPENAS-BP7 Pusat, 1994. Pembangunan Nasional dalam Angka. Kerjasama BAPPENAS dengan BP-7 Pusat, Jakarta.
- Blaug, Mark, 1976. The Emperical Status of Human Capital, Theory : A Slightly Jaudiced Survey. University of London Institute of Education and London School of Economic.
- BPS, 1995. Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1955. Majalah Departemen P U.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, UUD 1945, P-4 dan GBHN.
- Departemen Transmigrasi, Studi Evaluasi Pelaksanaan Repelita IV Menjelang Repelita V, Jakarta
- Dian Fakri, 1995, Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process, Untuk Evaluasi Manfaat dan Behan Perluasan Wilayah Administrasi Daerah Tingkat II Sawahlunto, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung
- Djoyohadikusumo, Sumitro, 1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, PT. Pustaka, LP3ES, Jakarta